PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Pahlawan Infrastruktur: Meneladani Semangat Pahlawan untuk Indonesia Maju

Taziruddin[1], La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy[2]
[1] Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
[2] Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe Kepulauan, Indonesia
Korespondensi: aziruddintata@gmail.com[1]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 26th, 2026
Revised Nov 4th, 2026
Accepted Nov 12th, 2026

Keyword:
Hari Pahlawan; Infrastruktur; Keadilan sosial; Pengabdian; Pemerataan Pembangunan.

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan wujud perjuangan generasi masa kini dalam meneladani nilai kepahlawanan melalui pengabdian kepada bangsa. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi nilai kepahlawanan dalam pembangunan infrastruktur serta tantangan pemerataan di Indonesia Timur, khususnya Pulau Sulawesi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-reflektif melalui studi kepustakaan dan analisis kebijakan terhadap literatur, regulasi, serta dokumen pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa infrastruktur berperan strategis dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Namun, ketimpangan aksesibilitas, kualitas jaringan jalan, dan keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum, dan masyarakat melalui tata kelola berintegritas, kolaborasi, serta pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia maju, adil, dan sejahtera. Semangat kepahlawanan perlu diwujudkan melalui profesionalisme aparatur, inovasi pelayanan, pemerataan pembangunan, serta komitmen bersama dalam menghadirkan infrastruktur yang aman, berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perjuangan para pahlawan merupakan fondasi historis yang membentuk identitas, persatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia (Salsabila & Danugroho, 2023; Tarigan et al., 2025).Pengorbanan para pejuang dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan tidak hanya meninggalkan warisan berupa kebebasan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mewariskan nilai keberanian, patriotisme, solidaritas, integritas, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa (Baka et al., 2026). Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang tidak terbatas pada konteks perjuangan kemerdekaan, melainkan perlu terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan nasional (Faslah, 2025). Implementasinya tercermin melalui sikap disiplin, tanggung jawab, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 dengan tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" memberikan pesan bahwa perjuangan tidak berhenti pada pengakuan terhadap jasa para pahlawan, tetapi harus diteruskan melalui tindakan nyata. Keteladanan para pahlawan perlu diterjemahkan menjadi etos kerja, kedisiplinan,

kejujuran, kepedulian sosial, dan kesediaan mengutamakan kepentingan masyarakat (Baka et al., 2026) Melangkah bersama menunjukkan pentingnya persatuan, gotong royong, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, sedangkan melanjutkan perjuangan mengandung makna tanggung jawab generasi penerus dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.



Gambar 1 Tema Hari Pahlawan Tahun 2026
Sumber : eduinsights.id (2026)

Dalam perspektif pembangunan nasional, infrastruktur memiliki kedudukan strategis karena menjadi fondasi bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta interaksi antarmasyarakat (Satyadharma, 2025; Siahay et al., 2023). Jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan infrastruktur permukiman bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sarana yang menentukan keterhubungan wilayah dan kesempatan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan (Listyawati et al., 2025). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dapat dipandang sebagai bentuk perjuangan generasi masa kini untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Hasina et al., 2026).

Pembangunan infrastruktur juga mempunyai hubungan erat dengan pemerataan kesempatan ekonomi dan keadilan sosial (Sukwika, 2018). Infrastruktur yang memadai dapat memperluas akses masyarakat terhadap pusat perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur berpotensi meningkatkan biaya distribusi, memperpanjang waktu perjalanan, menghambat aktivitas produktif, dan memperlebar kesenjangan antardaerah (Aisyah, 2025). (Afra et al., 2026)menunjukkan bahwa hubungan antara infrastruktur fisik dan sosial dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia memerlukan perhatian terhadap distribusi pembangunan antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari jumlah proyek yang diselesaikan, tetapi juga perlu dilihat dari pemerataan manfaat yang dihasilkan.

Persoalan pemerataan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Madani et al., 2026). Perbedaan kondisi topografi, persebaran penduduk, kapasitas fiskal daerah, potensi ekonomi, serta keterjangkauan wilayah menyebabkan kebutuhan infrastruktur setiap daerah tidak selalu sama. Wilayah Indonesia Timur menghadapi tantangan tersendiri karena sebagian kawasan memiliki karakteristik kepulauan, pesisir, pegunungan, dan wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Kondisi tersebut menuntut perencanaan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan spasial dan kebutuhan masyarakat setempat (Iswandi et al., 2026).

Pulau Sulawesi merupakan salah satu wilayah strategis di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, dan pariwisata (Iswandi et al., 2026). Posisi geografisnya menjadikan Sulawesi berperan penting dalam mendukung konektivitas Kawasan Timur Indonesia,

distribusi logistik, perdagangan, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Sosilawati et al., 2016). Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan ketersediaan dan kualitas infrastruktur antarwilayah di Pulau Sulawesi (Zhafira Ramadhani, 2024).

Kondisi tersebut tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 yang mengidentifikasi bahwa wilayah Sulawesi diarahkan menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam. Dokumen tersebut juga mengakui masih terdapat persoalan belum meratanya konektivitas, keterbatasan sarana dan prasarana antardaerah, serta belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan. Ketimpangan tersebut berpengaruh terhadap pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan, dan kawasan afirmasi. Selain itu, risiko bencana hidrometeorologi dan geologi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi (Kemen PU RI, 2025).

Persoalan konektivitas di Sulawesi juga berkaitan dengan hubungan antara pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, pusat perdagangan, dan kawasan permukiman. Keterbatasan aksesibilitas pada wilayah tertentu dapat menghambat pergerakan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas unggulan lainnya. Kondisi ini menjadi semakin kompleks di wilayah kepulauan dan pesisir yang membutuhkan keterpaduan antara jaringan jalan, pelabuhan, transportasi penyeberangan, serta fasilitas pendukung logistik. Pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi berpotensi menyebabkan tingginya biaya distribusi dan belum optimalnya nilai tambah ekonomi daerah (Aisyah, 2025).

Sejumlah penelitian memperkuat argumentasi tersebut. Laraibaphy et al. (2023) mengkaji hubungan infrastruktur dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia Timur dan menekankan pentingnya peninjauan kembali distribusi proyek infrastruktur agar lebih memperhatikan wilayah yang tertinggal. Awalia et al. (2024) juga menemukan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia Timur menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sementara itu, Raharjo et al. (2024) menunjukkan pentingnya pengembangan konektivitas melalui kerja sama kawasan BIMP-EAGA, termasuk koridor ekonomi Sulu-Sulawesi, untuk mendukung pengurangan kesenjangan wilayah.

Kajian mengenai pembangunan infrastruktur juga perlu mempertimbangkan kualitas tata kelola. Hidayat et al. (2025) memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menghadapi persoalan kepentingan politik dan praktik pencarian keuntungan apabila perencanaan serta pelaksanaannya tidak didukung tata kelola yang akuntabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan integritas kelembagaan, transparansi anggaran, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun dengan tata kelola yang baik akan lebih berpeluang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Nurpauziah et al., 2025).

Dalam kerangka kebijakan nasional, pembangunan infrastruktur memiliki landasan penting melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025–2029. Arah kebijakan tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing, mengembangkan pusat pertumbuhan, dan memperluas pemerataan pembangunan. Sejalan dengan itu, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan (Pertiwi et al., 2026).

Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai peran penting dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam kebutuhan pembangunan daerah. Sinergi pusat dan daerah diperlukan untuk

memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pemeliharaan infrastruktur berjalan secara terpadu. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah (Zubaidah et al., 2024).

Nilai kepahlawanan dalam hal ini dapat diwujudkan melalui semangat pengabdian aparatur dan seluruh tenaga pembangunan. Keberanian para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dapat diteladani melalui keberanian menghadapi persoalan pembangunan (Sudarsono et al., 2026). Semangat persatuan dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor, sedangkan pengorbanan dapat diterjemahkan menjadi kesediaan bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Nasionalisme dengan demikian tidak hanya diwujudkan melalui simbol dan seremoni, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan (Hasina et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis relevansi nilai kepahlawanan dalam pembangunan infrastruktur, mengidentifikasi tantangan pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur dengan penekanan pada Pulau Sulawesi, serta merumuskan arah penguatan pengabdian dan kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kontribusi artikel terletak pada pengintegrasian perspektif nilai kepahlawanan, etika pengabdian aparatur, dan keadilan pembangunan infrastruktur dalam satu kerangka refleksi kebijakan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ditempatkan bukan sekadar sebagai aktivitas teknis, tetapi juga sebagai manifestasi perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keutuhan bangsa.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-reflektif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami hubungan antara nilai kepahlawanan, semangat pengabdian aparatur, dan pembangunan infrastruktur dalam konteks pemerataan pembangunan nasional. Penulisan tidak menggunakan survei lapangan atau wawancara sebagai sumber data primer, melainkan memanfaatkan dokumen dan publikasi yang relevan dengan fokus kajian.

Sumber data meliputi dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, publikasi statistik, rencana strategis kementerian, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, ketimpangan pembangunan, nasionalisme, dan tata kelola pemerintahan. Dokumen utama yang dianalisis mencakup Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029 (Kemen PU RI, 2025), publikasi Badan Pusat Statistik, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tema, keterkaitan dengan kondisi pembangunan Indonesia Timur, serta kontribusinya terhadap pembahasan pemerataan infrastruktur dan nilai pengabdian. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi sumber, identifikasi informasi penting, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi kebijakan, dan penyusunan sintesis konseptual (Kasliyanto et al., 2025).

Analisis difokuskan pada empat tema utama, yaitu aktualisasi nilai kepahlawanan dalam pengabdian pembangunan, infrastruktur sebagai instrumen keadilan sosial, tantangan konektivitas dan pemerataan infrastruktur di Pulau Sulawesi, serta penguatan tata kelola dan kolaborasi pembangunan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dengan menghubungkan temuan literatur dan dokumen kebijakan terhadap konteks pembangunan nasional. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai

pentingnya menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk perjuangan generasi masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aktualisasi Nilai Kepahlawanan dalam Pembangunan Nasional

Nilai kepahlawanan memiliki relevansi yang kuat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional (Rajulan et al., 2025). Perjuangan para pahlawan mengajarkan bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Nilai tersebut menjadi landasan moral bagi aparatur pemerintah, pelaksana pembangunan, dan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing (Daulay, 2022).

Tema Hari Pahlawan 2026, "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", mengandung pesan bahwa keteladanan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam sektor infrastruktur, keteladanan tersebut dapat tercermin melalui profesionalisme, kejujuran dalam pengelolaan anggaran, kedisiplinan dalam pelaksanaan pekerjaan, kepatuhan terhadap standar teknis, dan komitmen menjaga kualitas hasil pembangunan (Sundari et al., 2025).

Semangat kepahlawanan juga dapat diwujudkan melalui keberpihakan terhadap masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses infrastruktur (Baka et al., 2026). Pembangunan jalan di wilayah terpencil, penyediaan air bersih, peningkatan jaringan irigasi, pembangunan jembatan, serta pengembangan infrastruktur permukiman merupakan bentuk pengabdian yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat (Idrus et al., 2025). Hal itu juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anhar (2025) yang menyatakan bahwa Komitmen Pemda Kab. Kolaka Utara dalam membangun infrastruktur SPAM di daerah terpencil dan menjadi bagian dari semangat pelayanan berbasis nasionalisme.

Dengan demikian, makna pahlawan masa kini tidak hanya dilekatkan pada individu yang memiliki jabatan atau penghargaan tertentu, tetapi juga pada setiap orang yang memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan publik (Sumardin & Kabubu, 2025). Insinyur, perencana, tenaga teknis, pekerja konstruksi, pengawas, aparatur pemerintah, dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan mempunyai tanggung jawab moral untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kehidupan bersama (Saleh et al., 2026). Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui profesionalisme, integritas, kepedulian sosial, serta komitmen menjaga kualitas pembangunan agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Nasionalisme dalam pembangunan tidak cukup dimaknai sebagai rasa cinta tanah air secara simbolik. Nasionalisme perlu diwujudkan melalui tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang adil dalam menikmati hasil pembangunan (Andriany et al., 2026; Safitri & Satyadharma, 2025).

Hasina et al. (2026) menempatkan nasionalisme sebagai landasan moral untuk mendorong pemerataan pembangunan, partisipasi masyarakat, penggunaan sumber daya lokal, dan keberlanjutan infrastruktur. Perspektif ini memperkuat pemahaman bahwa pembangunan merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai kebangsaan.

2. Infrastruktur sebagai Instrumen Pemerataan dan Keadilan Sosial

Infrastruktur mempunyai peran strategis dalam menciptakan keterhubungan antardaerah dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (Imsar & Zaman, 2024). Thasman et al. (2026) meyakini bahwa ketersediaan jalan dan jembatan memungkinkan masyarakat menjangkau pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Bendungan serta jaringan irigasi mendukung produktivitas pertanian, sedangkan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berkontribusi terhadap kualitas kehidupan masyarakat (Jannah & Kurniati, 2025).



Gambar 2 Pengambilan sampel air di beberapa titik mata air untuk SPAM Di Kabupaten Konawe Kepulauan

Dalam perspektif keadilan sosial, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan distribusi manfaat, bukan hanya besarnya investasi atau jumlah proyek yang dibangun. Infrastruktur yang terkonsentrasi pada wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan, tetapi belum tentu secara otomatis mengurangi kesenjangan. Sebaliknya, wilayah yang memiliki keterbatasan akses sering membutuhkan intervensi lebih besar agar mampu mengejar ketertinggalan (Harsono et al., 2025).

Nurdina (2021) memperlihatkan bahwa hubungan pembangunan infrastruktur dengan distribusi pendapatan tidak selalu bersifat sederhana. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan fisik perlu disertai kebijakan pemerataan yang memperhatikan kelompok masyarakat dan wilayah yang belum memperoleh manfaat secara optimal. Sebayang & Sebayang (2020) juga menunjukkan bahwa investasi infrastruktur memberikan dampak berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pada berbagai kawasan strategis di Indonesia.Temuan tersebut memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan perlu diukur berdasarkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Jalan yang dibangun, misalnya, tidak hanya dinilai berdasarkan panjang dan kualitas konstruksinya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mengurangi waktu tempuh, menekan biaya distribusi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan keterjangkauan pelayanan publik.

Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, keselamatan, dan keterjangkauan. Infrastruktur yang berkualitas bukan hanya infrastruktur yang memenuhi standar teknis, melainkan juga infrastruktur yang dapat digunakan secara aman dan memberikan manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, serta penduduk di wilayah terpencil (Ferdyana et al., 2025).

3. Tantangan Pemerataan Infrastruktur di Indonesia Timur dan Pulau Sulawesi

Indonesia Timur mempunyai karakteristik pembangunan yang beragam. Perbedaan geografis, kapasitas ekonomi, kondisi sosial, dan tingkat aksesibilitas menjadi faktor yang memengaruhi penyediaan infrastruktur (Iswandi et al., 2026). Kondisi tersebut menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan wilayah. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pemerataan investasi

infrastruktur, serta memastikan setiap kebijakan mampu menjawab tantangan geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pulau Sulawesi mempunyai posisi strategis karena menghubungkan berbagai kawasan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Namun, posisi strategis tersebut juga menghadirkan tantangan untuk memastikan bahwa konektivitas tidak hanya berkembang pada pusat-pusat ekonomi, tetapi juga menjangkau kawasan perdesaan, pesisir, dan kepulauan. Oleh sebab itu, pemerataan infrastruktur transportasi perlu menjadi prioritas pembangunan guna meningkatkan aksesibilitas, memperkuat konektivitas ant wilayah, membuka peluang ekonomi lokal, serta mendorong keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029 mengidentifikasi 20 kawasan prioritas di Pulau Sulawesi yang mencakup kawasan perkotaan, industri, pariwisata, perdesaan, afirmasi, serta kawasan konservasi dan rawan bencana. Dokumen tersebut juga mengakui bahwa belum meratanya konektivitas dan sarana prasarana antardaerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur Sulawesi harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap kawasan.

Selain itu, Pulau Sulawesi memiliki karakteristik ekonomi yang membutuhkan dukungan konektivitas multimoda. Pengembangan kawasan industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata memerlukan hubungan yang efisien antara lokasi produksi, pusat pengumpulan, kawasan pengolahan, pelabuhan, dan pasar. Apabila hubungan tersebut tidak didukung jaringan infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi daerah sulit berkembang secara optimal.



Gambar 3 Pernaikan jaringan dan intake untuk mengatasi kekurangan debit air akibat gangguan di jaringan distribusi SPAM Kab. Konawe Kepulauan, sebagai salah satu bagian dari semangat pelayanan berbasis nasionalisme

Tantangan tersebut juga terlihat pada kawasan kepulauan dan pesisir di banyak wilayah di Pulau Sulawesi. Keterbatasan akses jalan menuju pelabuhan, fasilitas penyeberangan, jaringan transportasi penghubung, dan infrastruktur pendukung logistik dapat memengaruhi keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Sulawesi perlu memperhatikan keterpaduan jaringan jalan darat dengan fasilitas pelabuhan dan penyeberangan serta akses menuju pusat-pusat kegiatan masyarakat (Jinca, 2009). Konektivitas tersebut menjadi faktor penting dalam memperlancar mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, memperkuat aktivitas ekonomi wilayah, serta mengurangi kesenjangan aksesibilitas antardaerah, khususnya

pada kawasan pesisir dan kepulauan yang membutuhkan pelayanan transportasi berkelanjutan dan berkeadilan.

Penelitian Awalia et al. (2024) memperlihatkan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia Timur masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Sementara itu, Laraibaphy et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya distribusi pembangunan infrastruktur yang lebih berpihak kepada wilayah yang belum berkembang. Raharjo et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengembangan konektivitas kawasan melalui kerja sama Sulu-Sulawesi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat hubungan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dengan demikian, tantangan infrastruktur di Pulau Sulawesi tidak hanya menyangkut persoalan teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut keadilan spasial, keterpaduan perencanaan, kapasitas pembiayaan, dan kemampuan pemerintah dalam menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses (Judijanto et al., 2026). Pembangunan yang berorientasi pada pemerataan harus menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penentuan prioritas, bukan semata-mata mempertimbangkan potensi keuntungan ekonomi (Mahadiansar et al., 2020).

4. Peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dalam Melanjutkan Perjuangan

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki kedudukan strategis dalam penyediaan infrastruktur nasional melalui pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur permukiman, serta penyediaan prasarana strategis (Drakel, 2024). Kebijakan pembangunan sektor pekerjaan umum diarahkan untuk memperkuat konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan memperluas pemerataan pembangunan (Reza, 2025).

Dalam sudut pandang pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tanggung jawab penting untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah (Amalia, 2021). Peran tersebut meliputi perencanaan teknis, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengawasan mutu, pemeliharaan, serta evaluasi manfaat infrastruktur. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar pembangunan tidak berjalan secara terpisah dan menghasilkan jaringan infrastruktur yang tidak terintegrasi.

Mahi & Resosudarmo (2025) menunjukkan bahwa investasi infrastruktur yang dikelola melalui pemerintah provinsi dan dukungan anggaran pemerintah pusat dapat memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan sosial ekonomi daerah. Hal ini memperkuat perlunya koordinasi antartingkat pemerintahan dalam mengoptimalkan manfaat pembangunan.

Peran pemerintah daerah juga perlu diperkuat melalui pendekatan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur seharusnya didasarkan pada pemetaan kondisi eksisting, tingkat keterjangkauan pelayanan, potensi ekonomi lokal, dan tingkat kerentanan wilayah. Dengan demikian, program pembangunan dapat diarahkan pada persoalan yang paling mendesak dan memberikan manfaat yang lebih luas (Idrus et al., 2025).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum juga perlu memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, termasuk Dinas Perhubungan, dalam membangun keterpaduan infrastruktur dan pelayanan transportasi (Wulandari et al., 2025). Jalan yang berkualitas membutuhkan dukungan sistem transportasi yang aman dan efisien, sementara pelabuhan dan terminal memerlukan akses jalan yang memadai agar fungsi konektivitas dapat berjalan optimal (Putri et al., 2026).



Gambar 4 Pengerjaan Ruas jalan Halu Oleo, Kota Kendari
Sumber : Taziruddin (2026)

Sinergi tersebut menjadi semakin penting bagi wilayah Sulawesi yang memiliki karakteristik daratan, pesisir, dan kepulauan. Integrasi perencanaan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, penyeberangan, dan kawasan permukiman dapat memperkuat hubungan antarpusat kegiatan serta mengurangi keterisolasian masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian proyek fisik (Zahwa & Sari, 2025).

5. Integritas dan Tata Kelola sebagai Fondasi Pengabdian Pembangunan

Pembangunan infrastruktur membutuhkan sumber daya yang besar, proses pengadaan yang kompleks, serta koordinasi berbagai institusi. Kondisi tersebut menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Trenggana & Vebritha, 2024). Tanpa tata kelola yang baik, pembangunan berpotensi menghadapi persoalan keterlambatan, pemborosan anggaran, penurunan kualitas pekerjaan, dan penyimpangan pelaksanaan (Sumarni et al., 2025).

Hidayat et al. (2025) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menjadi ruang munculnya kepentingan politik dan praktik pencarian keuntungan apabila tidak didukung mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, integritas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme aparatur dan seluruh pelaksana pembangunan. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menempatkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kedua landasan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya persoalan menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat, mutu pekerjaan, keberlanjutan fungsi, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, integritas dalam pembangunan harus tercermin sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan hasil pekerjaan (Handika et al., 2024).

Pengabdian aparatur juga perlu diwujudkan melalui keterbukaan terhadap kritik dan partisipasi masyarakat (Hasina & Satyadharma, 2022; Rejeki & Solihin, 2026). Masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk memberikan masukan, mengawasi, dan menyampaikan kebutuhan pembangunan. Pelibatan masyarakat dapat membantu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal (Suaib, 2023).

Nilai kepahlawanan dalam aspek ini tercermin melalui keberanian menjaga prinsip kebenaran, menolak penyimpangan, dan mengutamakan kepentingan publik (Ratmono et al., 2026). Pembangunan yang dilaksanakan dengan integritas merupakan bentuk pengabdian yang tidak hanya menghasilkan manfaat fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Nuradhawati & Rahmandika, 2025). Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen moral aparatur dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

6. Melangkah Bersama melalui Kolaborasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Tema "Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" menegaskan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab kolektif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media mempunyai peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. Pendekatan kolaboratif diperlukan karena kompleksitas persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri (Satyadharma & Susanti, 2024; Sentanu & Yustiari, 2024). Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui penyelarasan perencanaan pembangunan, penguatan pembiayaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui investasi dan penerapan teknologi konstruksi, akademisi melalui penelitian dan inovasi, sedangkan masyarakat dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan serta kondisi infrastruktur di lingkungannya (Wulandjani et al., 2025).

Pembangunan berkelanjutan juga perlu menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan penyediaan infrastruktur. Infrastruktur harus memperhatikan daya dukung lingkungan, risiko perubahan iklim, potensi bencana, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan manfaat. Hal ini sangat relevan bagi Pulau Sulawesi yang memiliki wilayah pesisir, pegunungan, kawasan industri, dan sejumlah kawasan dengan risiko bencana geologi serta hidrometeorologi.

Sebagai kerangka pembangunan global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan arah yang relevan, terutama tujuan ke-9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur; tujuan ke-10 mengenai pengurangan kesenjangan; tujuan ke-11 mengenai kota dan permukiman berkelanjutan; serta tujuan ke-16 mengenai kelembagaan yang efektif dan akuntabel. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan integrasi antara pembangunan fisik, peningkatan kualitas tata kelola, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus mampu menghubungkan wilayah sekaligus menghubungkan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jalan dan jembatan perlu membuka akses ekonomi, bendungan dan irigasi mendukung ketahanan pangan, air minum dan sanitasi meningkatkan kualitas hidup, serta infrastruktur permukiman menciptakan lingkungan yang lebih layak. Seluruh pembangunan tersebut harus ditempatkan dalam satu orientasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Supit et al., 2025).

Dengan semangat kepahlawanan, kolaborasi pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai koordinasi administratif, tetapi juga sebagai kesediaan seluruh pihak untuk bekerja bersama, berbagi tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bangsa (Rajulan et al., 2026; Satyadharma et al., 2026; Wulandjani et al., 2025).. Inilah bentuk perjuangan yang relevan bagi generasi masa kini, yaitu menghadirkan pembangunan yang tidak meninggalkan kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu (Sudarsono et al., 2026).

KESIMPULAN

Nilai kepahlawanan tercermin dalam pembangunan infrastruktur melalui pengorbanan, integritas, persatuan, dan pengabdian kepada bangsa. Infrastruktur berkualitas, merata,

inklusif, dan berkelanjutan menjadi instrumen memperkuat konektivitas, perekonomian, serta keadilan sosial. Tantangan pemerataan di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi, membutuhkan peningkatan kualitas jalan, konektivitas darat dan kepulauan, serta infrastruktur dasar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum perlu memperkuat sinergi, tata kelola, dan partisipasi masyarakat. Semangat kepahlawanan diwujudkan melalui kolaborasi dan komitmen melanjutkan perjuangan demi Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut harus didukung profesionalisme aparatur, inovasi pembangunan, serta keberpihakan terhadap masyarakat agar setiap hasil pembangunan memberikan manfaat nyata bagi generasi sekarang dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Afra, L., Abdullah, Z., Usrina, N., Anna, K., Pramanda, H., & Satyadharma, M. (2026). *Dasar-Dasar Perencanaan Transportasi: Pendekatan Terpadu untuk Sistem Transportasi*. Kamiya Jaya Aquatic.

Aisyah, N. (2025). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Konektivitas Ekonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat. *Economics Note*, *1*(2), 53–59. https://doi.org/10.70716/econote.v1i2.84

Amalia, H. (2021). Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. *Jurnal Kebijakan Publik*, *12*(1), 19–26. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7921

Andriany, L., Hasibuan, I. A., Nasution, S. P., Susilawati, E., & Suleman, A. R. (2026). *INDONESIA BERDAULAT, ADIL, DAN MAKMUR: Gagasan Dan Strategi Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 Edisi Khusus HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia*. Penerbit Bashaedu.

Anhar, E. (2025). *Strategi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara*. Program Studi Magister Manajemen Rekayasa Universitas Halu Oleo.

Awalia, R. P. R., Irwandi, I., Kamaruddin, C. A., Samsir, A., & Rahim, A. (2024). Analisis Kesenjangan Antar Wilayah di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, *10*(2), 22–30. https://doi.org/10.33197/jabe.vol10.iss2.2024.1954

Baka, W. K., Rianse, U., Rajulan, M., Mursalim, S., Silondae, T. T. A., Sjachrawy, L. O. M. I., & Prasetyo, E. W. (2026). *Dari Sejarah Perjuangan Menuju Masa Depan Bangsa*. Luana Publishing House.

Daulay, H. A. (2022). *Cinta Tanah Air Perspektif Kepegawaian*. Penerbit Adab.

Drakel, A. (2024). Konsep Pembangunan Tata Ruang, Infrastruktur, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Suatu Studi Wilayah Perkotaan). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)*, *6*(1), 58–69. https://jurnal.isdikkieraha.ac.id/index.php/jupek/article/download/752/614

eduinsights.id. (2026). Kemensos Luncurkan Logo Hari Pahlawan 2026 Lengkap Dengan Tema dan Maknanya. *Edu Insights*. https://eduinsights.id/kemensos-luncurkan-logo-hari-pahlawan-2026-lengkap-dengan-tema-dan-maknanya/

Faslah, R. (2025). *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. UIN Maliki Press.

Ferdyana, N. A., Wijaya, D., & Rinayuhani, T. R. (2025). Dari Partisipasi Ke Keberlanjutan: Implementasi Tata Kelola Inklusif Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Philosophiamundi*, *3*(4), 75–84. https://philosophiamundi.id/index.php/philosophia/article/view/156

Handika, R. A., Istikhoratun, T., & Buchori, L. (2024). Kajian Peranan dan Penerapan Kode Etik Profesi Keinsinyuran dalam Praktik Pekerjaan Bidang Sipil dan Lingkungan di Indonesia untuk Meningkatkan Efisiensi dan Perlindungan Keselamatan Kerja. *Jurnal Profesi Insinyur Indonesia*, *2*(3), 201–211. https://doi.org/10.14710/jpii.2024.23056

Harsono, I., Sulistiowati, S., Apriyanto, A., & Demung, I. W. (2025). *Buku Referensi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hasina, H., Mursalim, S., Sulistyo, G. A., & Sutriana, R. (2026). Implementasi Nilai Nasionalisme dalam Pengembangan Infrastruktur: The Implementation of Nationalism Values in Infrastructure Development. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, *5*(2), 28–40. https://doi.org/10.30998/0arxav34

Hasina, H., & Satyadharma, M. (2022). Peran Sumber Daya Manusia dan Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *2*(3),

217–227. https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.167

Hidayat, S., Tambunan, D., & Haning, Y. (2025). Unjust by default: The political economy of Indonesia's local government policy on infrastructure development. *Asian Journal of Comparative Politics*, *10*(2), 152–170. https://doi.org/10.1177/20578911241260442

Idrus, I., Umar, B., & Anwar, A. (2025). Pemetaan Wilayah untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Soreang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Konstruksi (MAJJAMA)*, *3*(1), 113–122. https://doi.org/10.63877/jpmk.v3i1.122

Imsar, I., & Zaman, M. Q. (2024). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *14*(2), 42. https://doi.org/10.35448/jequ.v14i2.30143

Iswandi, R. M., Sudarmo, H., & Hasan, A. (2026). *Strategi Pembangunan Berbasis Sumber Daya dan Kelembagaan: Integrasi Pengelolaan Wilayah, Komoditas Unggulan, dan Keberlanjutan di Kawasan Timur Indonesia*. Deepublish.

Jannah, M., & Kurniati, E. (2025). Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *4*(1), 231–251. https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.220

Jinca, M. Y. (2009). Keterpaduan Sistem Jaringan Antar Moda Transportasi di Pulau Sulawesi. *Jurnal Transportasi*, *9*(1), 1–14. https://doi.org/10.26593/jt.v9i1.341.%p

Judijanto, L., Prabandari, A. I., Yuliani, T. W., Pahude, M. S., & Perkasa, P. (2026). *Pembangunan Wilayah Pedesaan Dan Perkotaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kasliyanto, K., Puspa, R., Rauf, A., Darmawanti, S., Jani, J., Puspita, M., & Susanto, D. A. (2025). *Metode Penelitian & Pengembangan*. CV Edu Akademi.

Kemen PU RI. (2025). *Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029*. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Laraibaphy, A. E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2023). The Influence Of Infrastructure On Inequality Of Income Distribution In Eastern Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(2), 228–236. https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.8843

Listyawati, I. R. N., Prasetiyo, I., & Alfiah, I. R. (2025). *Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Kota: Konsep, Sistem, dan Aplikasi*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

Madani, F., Farid, N. F., & Nurhikmah, A. (2026). Keadilan Distribusi Dalam Pemerataan Ekonomi Di Indonesia Timur Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *4*(2), 257–274. https://doi.org/10.15575/ejil.v4i2.3761

Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *17*(1), 77–92. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550

Mahi, B. R., & Resosudarmo, B. P. (2025). Regional public infrastructures and development in decentralized Indonesia. *Applied Economics*, *57*(40), 6287–6304. https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2383330

Nuradhawati, R., & Rahmandika, M. A. (2025). *Etika Kepemimpinan dalam Pemerintahan: Membangun Integritas dan Kepercayaan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nurdina, W. (2021). Infrastructure and Income Inequality in Indonesia: 2009-2017. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *2*(2), 129–144. https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i2.132

Nurpauziah, F., Djuwita, D., & Layaman, L. (2025). Dampak Pengelolaan Dana Desa melalui Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi pada Desa Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, *3*(1), 397–408. https://doi.org/10.70095/jsat.v3i1.394

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025–2029.

Pertiwi, N., Hidayat, I. A., Sjachrawy, I. L. O. M. I., Muzammil Makmur, S. T., Muhammad Adam, S. T., Tukimun, I., & Dedy Ashari, S. T. (2026). *Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*. Arsy Media.

Putri, A. A., Rahmah, C., Ibad, M. Z., Rilansari, V., & Tama, Y. P. (2026). *Transportation Network Planning and Urban Structure*. Penerbit KBM Indonesia.

Raharjo, S. N. I., Pudjiastuti, T. N., & Nufus, H. (2024). Cross-border cooperation as a method of

conflict management: a case study in the Sulu-Sulawesi Sea. *Conflict, Security & Development*, *24*(3), 277–298. https://doi.org/10.1080/14678802.2024.2355528

Rajulan, M., Asriyati, Sahupala, R., & Satyadharma, M. (2026). Internalisasi Nilai Kepahlawanan dalam Pelayanan Arus Mudik Sebagai Wujud Pengabdi Aparatur Negara. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *5*(2), 922–937. https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/4139

Rajulan, M., Sulistyo, G. A., Syaiful, & Satyadharma, M. (2025). Semangat Pahlawan Sebagai Teladan dalam Membangun Transportasi Berkeadilan. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(04), 1326–1334. https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1536

Ratmono, B. M., Warjiyati, S., Nusantara, S. C., & Simbolon, H. A. (2026). *Integritas Untuk Indonesia: Jalan Pulang Menuju Kejayaan Bangsa*. Detak Pustaka.

Rejeki, I. S., & Solihin, I. (2026). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Digital untuk Mewujudkan Tata Kelola Transparan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 7152–7165. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4459

Reza, M. F. (2025). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah = The Effect Of Infrastructure Development By The Ministry Of Public Works And Public Housing On Regional Economic Growth*. Universitas Hasanuddin.

Safitri, T. N., & Satyadharma, M. (2025). Nasionalisme Warga (Perilaku Pengibaran Bendera Merah Putih Selama Bulan Agustus). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *2*(02), 888–903. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/797

Saleh, S., Jabir, J., & Inarmiwati, I. (2026). *Etika Dan Profesionalisme Dalam Teknik Sipil*. CV. Edu Akademi.

Salsabila, N. N., & Danugroho, A. (2023). Mengurai Sejarah Perjuangan Pahlawan Bangsa Indonesia Sebagai Penguatan Nasionalisme Generasi Muda Pasca Pandemi. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, *2*(1), 64–76. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/antroposen/article/view/5470

Satyadharma, M. (2025). Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kode Etik Insinyur dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Suatu Kajian Literatur). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, *17*(2), 43–56. https://doi.org/10.35457/58ynbj02

Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14

Satyadharma, M., Sutriana, R., Mursalim, S., & Barmuddin, B. (2026). Aktualisasi Bela Negara melalui Reformasi Pelayanan Publik di Sektor Perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *JURNAL DWIJA KUSUMA*, *14*(1), 11–21. https://doi.org/10.63824/jdk.v14i1.431

Sebayang, A. F., & Sebayang, L. K. (2020). Infrastructure Investment and Its Impact to Regional Development. *Economics Development Analysis Journal*, *9*(3), 269–280. https://doi.org/10.15294/edaj.v9i3.38859

Sentanu, I. G. E. P. S., & Yustiari, S. H. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Siahay, M. C., Ahmad, S. N., Gusty, S., Yusman, Supacua, H. A. I., Ampangallo, B. A., Rachman, R. M., Latupeirissa, J. E., Masdiana, & Maitimu, A. (2023). *Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Tohar Media.

Sosilawati, S. T., Wahyudi, A. R., Mahendra, Z. A., Massud, W., Mulyani, N., & Mona, H. L. L. (2016). *Sinkronisasi Program Dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan Dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi (Vol. 1)*. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Suaib, M. S. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Adab.

Sudarsono, L. M. U. S. P., Sukawati, F., Satyadharma, I. M., Putra, Z., & Murdiansyah, E. B. (2026). *Jangan Lupakan Mereka: Warisan Semangat Juang Para Veteran*. LSO Creative.

Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, *6*(2), 115–130. https://doi.org/10.14710/baf.%v.%i.%Y.61-69

Sumardin, O., & Kabubu, R. D. (2025). Pahlawan Dan Penghianat Dalam Sejarah: Analisis Peran Individu Dalam Peristiwa Sejarah. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, *9*(3), 58–65. https://doi.org/10.36653/jksb.v9i3.222

Sumarni, L. J., Mokodompit, E. A., & Werweti, W. (2025). Manajemen Keuangan Proyek Infrastruktur Transportasi untuk Mendukung Keberlanjutan. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi*, *18*(2), 353–359. https://ejournal.stiekia.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/360

Sundari, P. A. G., Sara, I. M., Surasmi, I. A., Putra, I. B. U., & Mahendrawati, N. L. M. (2025). *Melayani Dengan Integritas Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi*. Scopindo Media Pustaka.

Supit, C. J., Oroh, F. M., Sumarauw, J. S. F., Waani, J. E., Riogilang, H., & Riogilang, H. (2025). *Infrastruktur Berkelanjutan: Kolaborasi Lintas Bidang Teknik Sipil*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Tarigan, A. H., Syakira, D., Simanjuntak, M., & Sukasa, M. A. (2025). Perlawanan Bangsa Indonesia sebagai Fondasi Terbentuknya Kesadaran Nasional dan Kemerdekaan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(04), 310–326. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.38301

Taziruddin. (2026). *Manajemen Risiko pada Pelaksanaan Proyek Ruas Jalan Provinsi di Sulawesi Tenggara*. Universitas Halu Oleo.

Thasman, T., Ahmad, S. N., & Soeparyanto, T. S. (2026). Kajian Faktor Ketersediaan SDM, Ketersediaan Material, Cuaca Serta Anggaran dan Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Jalan Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi*, *19*(1), 65–74. https://doi.org/10.58431/jumpa.v19i1.405

Trenggana, W., & Vebritha, S. (2024). Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan. *Jurnal Publik*, *18*(02), 142–156. https://doi.org/10.52434/jp.v18i02.430

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Wulandari, T. A., Amelia, M., & Suryani, D. R. (2025). Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Tangerang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *5*(3), 4344–4354. https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/874

Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.

Zahwa, B. A. A., & Sari, P. I. (2025). Analisis Politik Ekonomi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(11). https://doi.org/10.62281/1t6kxj58

Zhafira Ramadhani, A. (2024). *Pengaruh Fiskal Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sulawesi*. Universitas Hasanuddin.

Zubaidah, S., Hermansyah, H., Indah, V. F., Laili, R., Yuniarti, Y., & Saleh, H. M. (2024). Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *7*(1), 69–86. https://doi.org/10.48093/jiask.v7i1.252